

IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM USING THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) APPROACH TO QUALITY OF RIAU PROVINCIAL FINANCIAL STATEMENTS

Y. Rahmat Akbar¹, Mar'aini²

^{1&2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda
Email : yrahmat.akbar@stiepersadabunda.ac.id¹

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of perceived ease of use and perceived usefulness in the Technology Acceptance Model on the implementation of the Regional Financial Management Information System and its impact on the quality of the Riau Provincial Government Financial Report. The study was conducted quantitatively with a causal and descriptive research design. The total sample of 100 respondents from the Treasurer (end-user) and the Financial Administration Officer (PPK) contained in the Office, Office, Agency and Inspectorate, Regional Government Work Unit (SKPD) of the Riau Provincial Government. Data collection techniques in this study using surveys and observations. The measurement scale uses a Likert scale. Data analysis techniques using Partial Least Square (PLS) analysis. The results showed that the perception of ease of use and perceived usefulness had a direct and significant positive effect on the successful implementation of the Regional Financial Management Information System, but did not have a significant direct effect on the quality of local government financial statements. The successful implementation of the Regional Financial Management Information System has a direct and significant positive effect on the quality of local government financial statements. Perceived ease of use and perceived usefulness can have an indirect positive effect on the quality of local government financial reports mediated by the successful implementation of the Regional Financial Management Information System.

Keywords: Financial Statements Quality, SIPKD, TAM

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dalam Model Penerimaan Teknologi terhadap implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan dampaknya pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan desain riset kausal dan deskriptif. Jumlah sampel sebesar 100 orang responden dari Bendaharawan (end user) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang terdapat pada Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan survey dan observasi. Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Teknik analisis data menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, namun tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dapat memberikan pengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimediasi oleh keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, SIPKD, TAM

PENDAHULUAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai realisasi anggaran. Karakteristik tersebut adalah prasarat yang diperlukan agar laporan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni handal, relevan, dapat difahami dan dibandingkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010). Kurangnya kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat dari ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada entitas yang ada di kabupaten dan kota se Provinsi Riau. BPK mengungkapkan secara umum bahwa pemeriksaan pada tahun 2016 terhadap LKPD pada kabupaten dan kota di Provinsi mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kecuali pada kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Di tahun 2017, LKPD mengalami peningkatan opini dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kecuali kabupaten Rokan Hilir yang masih dalam predikat WDP (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019)

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan ada 4 kriteria yang menjadi patokan dalam memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu : 1. Kepatuhan terhadap perundang-undangan. 2. Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang andal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan kualitas informasi pelaporan, yaitu terdiri atas pencatatan yang tidak atau belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat dalam menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, dan sistem informasi akuntansi belum didukung oleh SDM yang memadai. 3. Penerapan standar akuntansi pemerintah, dan 4. Pengungkapan. Opini yang diberikan oleh BPK juga mempertimbangkan materialitas dan penyajian yang akurat antara komponen laporan keuangan dan keseluruhan informasi keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan yang disusun oleh SKPD-SKPD pada suatu daerah, sehingga apabila hasil dari sebuah LKPD tidak baik, hal tersebut mengindikasikan kurang baiknya SKPD dalam menyusun laporan keuangannya.

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 17, 2003) dan (Undang-Undang Nomor 1, 2004) selaku pengguna anggaran diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan harus disusun sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010) dan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64, 2013), sehingga Pemerintah Daerah memerlukan sistem aplikasi yang dapat membantu menghasilkan Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya secara komprehensif mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Dengan penerapan sistem diharapkan dapat membantu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih, transparan, serta menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 56, 2005) yang menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Kementerian Dalam Negeri memberi respon positif dengan membangun sebuah sistem pengelolaan keuangan yang disebut dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang mudah, cepat, akurat, akuntabel, serta terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan lebih baik diwaktu yang akan datang.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebuah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Aplikasi SIPKD juga merupakan salah satu sistem bidang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33, 2004), (Peraturan Pemerintah Nomor 56, 2005), (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46, 2006).

Keberhasilan sistem informasi Keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan sistem oleh pengguna akhir (end users) atau pemahaman dalam mengikuti alur transaksi keuangan daerah menggunakan sistem (Budiman & Arza, 2013). Keberhasilan implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pengguna untuk menerima sistem tersebut. Tingkat penerimaan pengguna memiliki pengaruh besar dalam menentukan sukses atau tidaknya penerapan suatu sistem informasi. Teori Perilaku biasa digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu sistem informasi, teori perilaku yang biasanya digunakan adalah *Technology Acceptance Model (TAM)*.

Technology Acceptance Model bertujuan untuk dapat menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. *Technology Acceptance Model (TAM)* menganggap bahwa empat keyakinan individu, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), persepsi sikap penggunaan (*attitude*

toward using) dan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*) merupakan determinan utama perilaku adopsi dan akhirnya menggunakan teknologi (Budiman & Arza, 2013). Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) adalah faktor utama yang mempengaruhi penerimaan individual terhadap suatu sistem teknologi informasi. Kedua faktor tersebut dianggap berpengaruh terhadap minat perilaku. Pengguna akan berminat untuk menggunakan suatu teknologi informasi apabila teknologi informasi tersebut mudah digunakan dan memiliki manfaat.

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* sebagai model dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan dua persepsi individual, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian sebelumnya hanya mengukur tingkat penerimaan atas suatu sistem teknologi informasi menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model*, dan menganalisis kualitas informasi yang terkandung dalam suatu LKPD dengan penerapan sistem informasi dalam pengolahannya secara parsial. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penggabungan penelitian sebelumnya, yaitu mengukur tingkat keberhasilan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan *Technology Acceptance Model* dengan dua variabel yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) sebagai tolak ukur yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Manajemen secara umum adalah suatu sistem yang dapat membantu manajemen dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis evaluasi data, serta menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud, 2013). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. Aplikasi SIPKD digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka memperkuat persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplimentasian berbagai peraturan perundang-undangan. SIPKD digunakan untuk membantu mewujudkan pengelolaan keuangan yang mudah, cepat, akurat, akuntabel, serta terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan lebih baik diwaktu yang akan datang. Dasar pengembangan aplikasi SIPKD yaitu : 1. Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal, 2. Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat, 3. Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, 4. Adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

SIPKD dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Keuangan Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya (Sari, Rosidi, & Roekhudin, 2016). Tujuan diselenggarakannya SIPKD adalah sebagai berikut: (1) Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. (2) Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pengendalian defisit anggaran. (3) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah dan defisit anggaran daerah.

Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan SIPKD, maka akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun pemeliharaan, dan bagi pemerintah yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi lain maka akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut. Sistem Informasi sangat penting dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah meliputi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, membantu menyusun laporan keuangan agar lebih efisien dan akurat, serta menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh

Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Damayanti, 2007). Pengertian ini hampir sama dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan pengertian Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan (Bastian, 2006). Laporan Keuangan Pemerintah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi (Prosono & Basukianto, 2015). Oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dinyatakan mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip tersebut adalah basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Kualitas laporan keuangan dapat diukur berdasarkan sepuluh karakteristik, yaitu : Dapat dipahami, Relevan, Materialitas, Keandalan/Reliabilitas, Penyajian jujur, Substansi mengungguli bentuk, Netralitas, Pertimbangan sehat, Kelengkapan dan dapat dibandingkan (Bastian, 2006). Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem teknologi informasi sangatlah diperlukan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan ketidaktepatan dalam penyusunan laporan keuangan.

Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*)

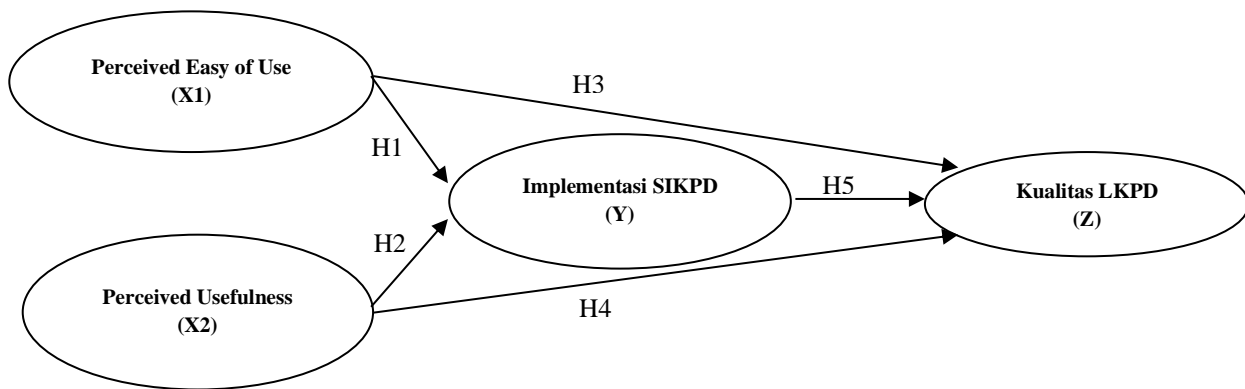
Model Penerimaan Teknologi (TAM) mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk menjelaskan pengguna yang mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna. Ciri khas dari Model TAM adalah sederhana namun bisa memprediksi penerimaan maupun penggunaan teknologi. Integrasi model TAM dilakukan dengan memasukkan faktor intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel eksternal yang mempengaruhi penggunaan sistem. Faktor intrinsik berarti muncul dari dalam individu pengguna, sedangkan faktor ekstrinsik berarti karena faktor lingkungan yang mendorong pengguna menggunakan sistem informasi. TAM mengasumsikan bahwa penerimaan seseorang atas teknologi informasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu *Perceived Usefulness* (Persepsi Kebermanfaatan) dan *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan). Tujuan utama dari TAM adalah untuk membantu memberikan kerangka dasar untuk penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap dan tujuan pengguna (Davis, 1989).

Perceived ease of use sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Wibowo, 2009). Persepsi kemudahan penggunaan sebagai ukuran dimana pengguna di masa yang akan datang menganggap suatu sistem adalah bebas hambatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur *perceived ease of use* yaitu mudah dipelajari, fleksibel, dapat mengontrol pekerjaan, serta mudah digunakan (Davis, 1989). *Perceived ease of use* juga dapat diukur melalui indikator jelas dan mudah dimengerti, serta mudah dikuasai (Yahyapour, 2008).

Perceived usefulness didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya (Davis, 1989). Persepsi terhadap kemanfaatan sebagai kemampuan subjektif pengguna di masa yang akan datang di mana dengan menggunakan sistem aplikasi yang spesifik akan meningkatkan kinerja dalam konteks organisasi. Persepsi kemanfaatan merupakan definisi dimana seseorang percaya dengan menggunakan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja mereka. *Perceived usefulness* diukur melalui indikator seperti meningkatkan kinerja pekerjaan, menjadikan pekerjaan lebih mudah serta secara keseluruhan teknologi yang digunakan dirasakan bermanfaat. *Perceived usefulness* dapat diukur dengan indikator meningkatkan produktivitas, menjadikan kerja lebih efektif, dan pekerjaan menjadi lebih cepat (Gefen, Karahanna, & Straub, 2013).

Kerangka Penelitian dan Hipotesis

Berdasarkan teori dan jurnal yang telah diperoleh, disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H 1 : Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPKD
- H 2 : Persepsi manfaat (*perceived usefulness*) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPKD
- H 3 : Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- H 4 : Persepsi manfaat (*perceived usefulness*) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- H 5 : Keberhasilan implementasi SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara kuantitatif yang dilakukan satu kali dalam satu periode (*single cross sectional design*). Pada jenis riset ini, kegiatan pengumpulan data atau informasi yang didapat dari satu jenis sampel responden untuk satu saat/waktu. Pada penelitian ini dilakukan survei dengan menyebarkan kuesioner, selanjutnya data atau informasi yang diperoleh akan diolah dengan metode statistik. Wawancara dilakukan dengan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Riau untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi Riau dalam proses pengelolaan keuangan atau pembuatan Laporan Keuangan, serta terhadap staf di SKPD untuk memastikan pengguna akhir dan pihak-pihak yang terkait dengan SIPKD. Kuisisioner digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden, yaitu Bendaharawan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Riau. Studi literatur dilakukan guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan variabel penelitian, didapat dari jurnal dan website resmi pemerintah.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Item
Persepsi Kemudahan Penggunaan (<i>perceived ease of use</i>)	suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Wibowo, 2009)	1. Jelas	X1.1
		2. Mudah dimengerti	X1.2
		3. Mudah dikuasai	X1.3
Persepsi manfaat (<i>perceived usefulness</i>)	suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya (Davis, 1989)	1. Meningkatkan produktivitas	X2.1
		2. Menjadikan kerja lebih efektif	X2.2
		3. Pekerjaan menjadi lebih cepat	X2.3
		4. Teknologi yang digunakan dirasakan	X2.4

		bermanfaat	
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan (Machmud, 2013)	1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah	Y1
		2. Membantu menyusun laporan keuangan agar lebih efisien dan akurat	Y2
		3. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien	Y3
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan (Bastian, 2006)	1. Dapat dipahami	Z1
		2. Relevan	Z2
		3. Materialitas	Z3

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri atas Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat Daerah, dengan Bendaharawan (end users) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) selaku pihak verifikator sebagai objek penelitian. Sedangkan metode penarikan sampel menggunakan teknik *convenience sampling* adalah Bendaharawan (end user) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang terdapat pada Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat. Ukuran sampel yang diambil bahwa untuk memenuhi kriteria sampel yang sesuai ditentukan dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* adalah antara 100 – 200 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2008). Sehingga jumlah sampel yang digunakan yaitu 100 responden.

Teknik analisa data yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan analisis *Structural Equation Modeling* berbasis *variance* (SEM-PLS). *Partial Least Square* (PLS) dipilih karena merupakan salah satu alat analisis SEM yang berdasarkan varians/komponen yang tidak memerlukan terpenuhi berbagai persyaratan (Ghozali, 2008), sehingga dalam hal ini, penelitian tidak dilakukan pengujian berbagai asumsi. SEM-PLS dapat meneliti variabel atau konstruk yang tidak dapat teramati atau tidak dapat diukur langsung (unobserved), menguji kesalahan pengukuran (measurement error) untuk variabel atau konstruk yang teramati (observed), mengkonfirmasi teori sesuai dengan data penelitiandan dapat menjawab berbagai masalah riset dalam satu set analisis secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses analisis PLS ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*) dan analisa jalur untuk menguji hipotesis.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*outer model*) menggambarkan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Evaluasi model pengukuran meliputi validitas konstruk dan reliabilitas konstruk. Validitas konstruk adalah suatu bentuk pengujian yang ingin mengetahui korelasi konstruk dengan indikatornya. Uji validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen menggunakan *loading factor* pada *outer loading* dan validitas diskriminan menggunakan *average variance extracted* (AVE). Sedangkan uji reliabilitas menggunakan nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* di atas 0,60 (Nunnally, 1978). *Average variance extracted* (AVE) juga digunakan untuk evaluasi validitas diskriminan dengan kriteria harus diatas 0,50 (Fornell & Lacker, 1981).

Tabel 2. Outer Model

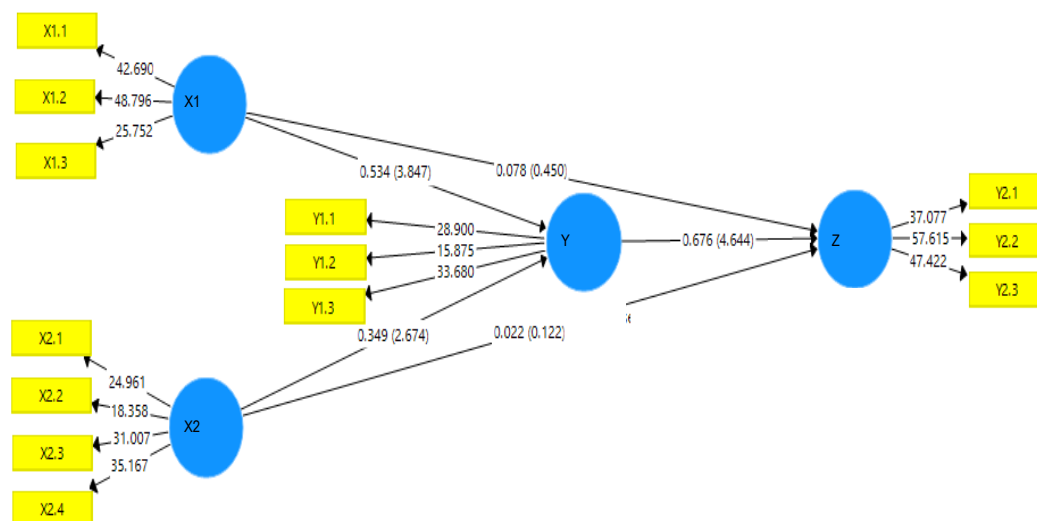
Konstruk/Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Item (Indikator)	<i>Outer loading</i>
Persepsi Kemudahan Penggunaan (<i>perceived ease of use</i>)	0,898	0,929	0,813	X1.1	0,912
				X1.2	0,930
				X1.3	0,861
Persepsi manfaat (<i>perceived usefulness</i>)	0,884	0,929	0,767	X2.1	0,891
				X2.2	0,823
				X2.3	0,886
				X2.4	0,902
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	0,810	0,887	0,724	Y1	0,864
				Y2	0,811

Daerah				Y3	0,875
Keberhasilan Implementasi SIPKD	0,926	0,953	0,871	Z1	0,903
				Z2	0,929
				Z3	0,925

Pada pengujian validitas konvergen berdasarkan outer loading akan dinyatakan valid bila nilai loading factor berada di atas 0,70 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2008). Berdasarkan Tabel 4.6 bahwa dari pengujian outer loading menunjukkan nilai p-value dibawah 0,05 (5%), dan seluruh indikator valid karena nilainya di atas 0,70. Begitu juga dengan pengujian reliabilitas yang menunjukkan composite reliability dan cronbach alpha telah memenuhi syarat di atas 0,60, dengan nilai AVE berada diatas 0,50. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konstruk dalam penelitian ini reliabel. Sehingga secara keseluruhan, hasil measurement model (outer model) konstruk telah memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis selanjutnya adalah analisis model struktural secara *full model*. Model struktural adalah model yang dibangun oleh hubungan antar variabel laten/konstruk yang indikator-indikatornya telah diuji dengan dilakukan analisis terhadap tingkat validitas dari indikator-indikator pembentuk variabel laten yang diuji. Analisis hasil pengolahan data pada tahap *full model* PLS dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji statistik.



Gambar 2. Output Model Struktural

Dari model struktural yang diperoleh dari output SmartPLS, kita dapat menunjukkan pengaruh antara variabel laten yang satu dengan yang lainnya dengan melihat nilai-t (t-statistik) dan nilai p (p value). Ketika t-statistik > 1.96 dan p value < 0,05 maka variabel laten tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel laten lainnya. Sebaliknya, ketika t-statistik < 1.96 dan p value < 0,05 maka variabel laten tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel laten lainnya. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh dapat dilihat dari nilai koefisien.

Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan untuk menentukan besar kemampuan konstruk dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada konstruk lainnya. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R² (R-square) yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R² dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Inner Model

Coding	Variabel	R-Square
X1	Persepsi Kemudahan Penggunaan (<i>perceived ease of use</i>)	-
X2	Persepsi manfaat (<i>perceived usefulness</i>)	-
Y	Keberhasilan Implementasi SIPKD	0,747
Z	Kualitas Laporan Keuangan	0,582

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis untuk melihat apakah model yang diusulkan didukung oleh data. Dalam penelitian ini terdapat lima hipotesis yang telah diuji melalui analisis PLS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	<i>t-statistic</i>	<i>p-value</i>	Hasil
H 1	Persepsi kemudahan penggunaan (<i>perceived ease of use</i>) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPKD	3,847	0,000	Diterima
H 2	Persepsi manfaat (<i>perceived usefulness</i>) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPKD	2,674	0,000	Diterima
H 3	Persepsi kemudahan penggunaan (<i>perceived ease of use</i>) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	0,450	0,653	Ditolak
H 4	Persepsi manfaat (<i>perceived usefulness</i>) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	0,122	0,903	Ditolak
H 5	Keberhasilan implementasi SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	4,644	0,000	Diterima

Persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah secara langsung, dengan kontribusi sebesar 53,4 persen dan variabel persepsi manfaat dengan kontribusi sebesar 34,9 persen. Kualitas informasi dari sistem informasi diukur dari persepsi penggunaannya yaitu informasi yang dapat dihasilkan harus relevan, akurat dan dapat dipercaya. Jika kualitas informasi yang dihasilkan baik maka pengguna akan mudah menggunakan sistem tersebut sehingga memperoleh informasi yang berkualitas. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Budiman & Arza, 2013) yang membuktikan bahwa untuk keberhasilan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan peranan persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat.

Persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan tidak dapat memberikan pengaruh langsung yang signifikan dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) karena hanya memiliki kontribusi yang kecil yaitu sebesar 2,2 persen dan 7,8 persen. Hal ini disebabkan sistem informasi memiliki persepsi manfaat dan kemudahan hanya bagi *user* pengguna SIKPD tersebut, sedangkan laporan keuangan dapat berkualitas jika dikerjakan dengan benar oleh pengguna sistem tersebut. Meskipun demikian, variabel persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah melalui mediasi variabel keberhasilan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan kontribusi sebesar 23,6 persen dan 36,1 persen. Hal ini berarti bahwa kedua variabel ini hanya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, apabila dapat menciptakan keberhasilan SIKPD terlebih dahulu. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian (Gefen, Karahanna, & Straub, 2013) bahwa integrasi model penerimaan teknologi (TAM) dapat memberikan efek langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas yang dicerminkan oleh persepsi manfaat dan kemudahan.

Keberhasilan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan kontribusi sebesar 67,6 persen. Jadi, peranan variabel implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini sangat penting dalam menciptakan kualitas LKPD. Laporan keuangan perlu disampaikan secara tepat waktu agar tidak kehilangan nilai informasinya. Pemanfaatan sistem dan teknologi informasi sangat membantu dalam percepatan pengolahan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Prosono & Basukianto, 2015), (Sari, Rosidi, & Roekhudin, 2016). Di samping itu juga menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian (Machmud, 2013), bahwa pentingnya peranan penerapan atau implementasi sistem informasi terhadap efektifitas kerja pegawai dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah dilakukan dengan cara meningkatkan variabel yang paling dominan yaitu menciptakan keberhasilan pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIKPD).

PENUTUP

Keberhasilan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan peranan persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi

Riau yang terdiri atas Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat Daerah, dengan Bendaharawan (end users) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) selaku pihak verifikator. Keberhasilan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sedangkan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) memberikan kontribusi yang kecil dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di lingkungan SKPD Provinsi Riau. Hal ini karena persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh pemakai sistem tersebut hanya memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui mediasi variabel keberhasilan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Kedua variabel ini hanya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, apabila dapat menciptakan keberhasilan SIKPD terlebih dahulu. Sehingga, peranan variabel implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini sangat penting dalam menciptakan kualitas LKPD.

Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk dapat memberikan keberhasilan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIKPD) supaya tercipta laporan keuangan daerah yang berkualitas. Keberhasilan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini diperoleh dengan membuat sistem yang jelas dan mudah dimengerti, serta mudah dikuasai oleh *user* sehingga menciptakan persepsi kemudahan penggunaan. Selain itu keberhasilan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah juga dapat diperoleh melalui persepsi manfaat sistem informasi yang meningkatkan produktivitas, menjadikan kerja lebih efektif dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester*. Pekanbaru: BPK Perwakilan Riau.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Budiman, F., & Arza, F. I. (2013). Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Wahana Riset Akuntansi 1 (1)*.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, And User Acceptance of Information Technology*. *MisQuarterly* 13 (3).
- Fornell, C. R., & Lacker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18. <http://dx.doi.org/10.2307/3151312> , 39-50.
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2013). *Trust and TAM : An Integrated Model*. *MisQuarterly* 27 (1).
- Ghozali, I. (2008). *Structural Equation Modeling*. Semarang: FE Universitas Diponegoro.
- Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson. (2008). *Multivariate Data Analysis 5th Edition*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Halim, A., & Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Machmud, R. (2013). Peranan penerapan sistem informasi manajemen terhadap efektivitas kerja pegawai lembaga pemsyarakatan narkotika (lapastika) Bollangi Kabupaten Gowa. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar* 9 (3), 409-421.
- Nunnally, J. (1978). *Psychometric theory. 2nd Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64. (2013). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Republik Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46. (2006). *Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56. (2005). *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia (138).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Prosono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Daerah:Faktor Yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol.22 No.2*, 188-200.
- Sari, D. C., Rosidi, & Roekhudin. (2016). Determinan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan SKPD. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol.2 No.1*, 17-30.
- Undang-Undang Nomor 1. (2004). *Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Lebaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17. (2003). *Keuangan Negara*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33. (2004). *Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Wibowo, A. (2009). *Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Yahyapour, N. (2008). Determining Factors Affecting Intention to Adopt Banking Recommender System. *Industrial Marketing and E-commerce*, 425-478.